

Peran Pemerintah dan Masyarakat Negeri Porto Haria dalam Menjaga Perdamaian

Deny Sialana¹, Fricean Tutuarima², Lisy Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
Email: denysialana25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dan masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria dalam menjaga perdamaian. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran keadaan sebenarnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Negeri Porto dan Negeri Haria telah melakukan tindakan-tindakan nyata dalam masyarakat guna menjaga perdamaian antar Negeri. Faktor yang mempengaruhi pemerintah dan masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria yaitu faktor penghambat seperti sulit untuk membangun rasa kepercayaan, kepentingan lain diluar Pemerintah, adanya profokasi dan lain-lain. Sedangkan faktor pendukung seperti Kerja sama antar kedua Negeri, Tidak mencari masalah dengan mengaku-ngaku hak wilayah.

Kata Kunci : Peran Pemerintah dan Masyarakat, Perdamaian Negeri Porto dan Haria

Abstract

This research aims to find out how the government functions as well as factors that affect the government and people of Porto and Haria Countries in maintaining peace. The type of research used is qualitative descriptive which aims to describe and provide an overview of the true situation by using data collection techniques, namely interviews and documentation. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the Government of Porto and Haria State has taken concrete actions in society to maintain peace between countries. Factors that affect the government and people of Porto and Haria Are inhibiting factors such as difficult to build a sense of trust, other interests outside the Government, the existence of profokasi and others. While supporting factors such as cooperation between the two countries, do not look for problems by claiming - strengthening territorial rights.

Keywords: The role of Government and Society, Peace of Porto and Haria

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia memiliki keragaman seperti beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi " *Integrating force* " yang mengikat kemasyarakatan namun juga dapat menjadi sebuah penyebab benturan antar budaya, ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup(Akhmadi 2019). Berikutnys menurut Harrison and Loring (2020)mengemukakan bahwa setiap individu yang terhubung dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pastinya membawa gen-gen tersendiri sebagai pembeda antara satu individu dengan yang lainnya. Hal ini bila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan dan keunikan inilah yang akan menyebabkan setiap individu rentan terjangkit pada suatu konflik.

Konflik dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya merupakan fenomena yang sangat alamiah. Biasanya pada tahap awal konflik yang terjadi hanya berbentuk non fisik tetapi seiring dengan waktu konflik juga dapat berkembang sampai ke tingkat fisik baik yang bersifat kekerasan

dengan dan tanpa tangan kosong(Lestari and Sa'adah 2021).Suatu konflik sering mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa, trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipasti sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum(Gaghaube, Lasut, and Karisoh 2021).pada kehidupan sosial kemasyarakatan atau warganegara yang berkonflik serta masalah-masalah watak dan sikap warganegara oleh karena itu penulis ingin menggambarkan akan penting membangun kembali sikap warga negara yang sudah mulai pudar dewasa ini, dengan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa upaya untuk membina watak dan sikap tidak hanya menjadi tugas dari sebuah institusi pendidikan formal saja, melainkan perlu ada upaya kesinambungan dan sinergi dari keluarga dan masyarakat(Tuhuteru 2014:100)

Berikut akan penulis sampaikan contoh konflik yang ada di Maluku Tengah dimana konflik antar sesama masyarakat disebabkan oleh perbatasan petuanan. Konflik ini terjadi antara 2 Negeri, yakni Negeri Horale dan Negeri Saleman Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.Sengketa ke-2 desa ini berawal dari adanya bantuan "Pengadaan Bibit anakan Jati " Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan Dan Hutan (GERHAN) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2005-2006, dan lokasi Rehabilitasi lahan adalah Negeri Saleman. Kegiatan Rehabilitasi Lahan ini secara teknis diawasi langsung oleh Dinas Kehutanan dengan melibatkan kelompok-kelompok tani sebagai pelaksana di lapangan hingga anakan – anakan jati itu tumbuh dengan baik. Ketika Negeri Horale mengetahui bahwa kawasan yang menurut pihaknya adalah petuanan mereka, mendatangi lokasi penanaman tersebut, kemudian mereka komplain dengan cara ada yang beradu mulut, ada yang langsung mencabut tanaman yang telah ditanam, dan aksi-aksi fisik lainnya yang sama-sama mereka pertahankan bahwa kawasan itu adalah miliknya. Namun ada sumber lain yang menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa lama karena pada tahun 1965 ke-2 Negeri ini pernah bertikai untuk masalah yang sama yaitu tentang "Ketidakjelasan Batas Petuanan" yang menjadi penyebab sengketa antar warga ini. Kasus ini belum ada penyelesaian hingga saat ini. Hal ini dikarenakan tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti batas-batas petuanan yang ada, masyarakat hanya berpatokan pada batas-batas alamiah dimana batas-batas alamiah itu kadang bisa hancur oleh keadaan alam itu sendiri seperti banjir, longsor dan lain-lain. Masalah yang sama hampir dialami oleh masyarakat hukum lainnya dalam lingkup kabupaten Maluku Tengah dengan kasus-kasus ketidakjelasan batas-batas kepemilikan yang menjadi peluang sengketa bagi masyarakat untuk masa sekarang maupun masa mendatang. (Henry Arianto' Sapiah Talaohu, 2011)

Begitu pula dengan masyarakat Negeri Haria dan Negeri Porto yang mana konflik antar masyarakat ke dua Negeri ini bukan merupakan konflik yang baru terjadi di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara Negeri Porto dan Negeri Haria sudah berlangsung selama puluhan tahun dan belum ada cara penyelesaiannya.Konflik yang terjadi antara masyarakat Negeri Porto dan masyarakat Negeri Haria dipicu akibat adanya perebutan hak kepemilikan batas tanah. Dimana kedua Negeri tersebut mengklaim bahwa batas tanah kedua Negeri ini mencakup sumber mata air yang dikenal dengan nama " Air Raja ". Air Raja merupakan mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan air bersih membuat masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria memiliki keinginan untuk menguasai sumber mata air tersebut sehingga terjadinya konflik diantara masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah atau pun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. (Idrus 2007). Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan, data dari hasil wawancara akan diuraikan dengan masing-masing tokoh yang dijadikan

informan. Sehingga memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti (Komariah and Satori 2011)

HASIL PENELITIAN

Fungsi Pemerintah Negeri Porto dan Haria Sebagai Pembina Ketentraman Masyarakat.

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam artian ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang mana fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Oleh karena itu fungsi pemerintahan Negeri sangatlah penting dalam menciptakan perdamaian antar Negeri.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan yakni di Negeri Porto dan Negeri Haria terkait dengan tindakan nyata yang di lakukan oleh Pemerintah dalam membina ketentraman Masyarakat, baik itu di Negeri Porto maupun di Negeri Haria diantaranya yaitu dengan membangun kerja sama antar ke dua Negeri dengan adanya Ibadah Damai Porto Haria (POHAR) yang di lakukan pad tanggal 27 setiap bulan berjalan, dan di tanggal 27 Desember ke dua Negeri juga mengadakan perayaan Natal bersamadengan tujuan membangun tekad dan komitmen di hadapan Tuhan untuk merawat Damai dan bingkai orang basudara(N . Hattu). Selain itu juga tanpa di sadari 8 tahun perjalanan ini begitu eratnya kedua Negeri membangun hubungan-hubungan satu dengan yang lain seperti ibadah lainnya yaitu ibadah Sektor Getsemani Betlehem (GEBET) dan Bet’el Lithos (BETLIS) yang di mana ibadah gabungan antar sektor dari Negeri Porto dan Negeri Haria. (N. Hattu). Jika ada terjadi kesalah-pahaman yang di lakukan masyarakat antar kedua Negeri maka dari pihak pemerintah kedua Negeri menyelesaikannya secara bersama .

Selain itu juga menurut M. Latuihamallo, Sekretaris Negeri Porto mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah yaitu kordinasi – kordinasi yang di bangun oleh pemerintah Porto dan Haria terkait dengan kesadaran kedua Negeri serta membangun pergumulan bersama setiap bulan berjalan. Pemerintah dan Masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria mendukung penuh Perdamaian yang di nyatakan dalam bingkai orang basudarah dan perdamaian ini menjadi contoh kepada Negeri – Negeri lain yang ada di Bumi Maluku. Di sisi lain juga berdasarkan hasil wawancara dengan J. Latupeirissa, Ketua Saniri Negeri Haria menyatakan bahwa upaya-upaya perdamaian yang harus dilakukan ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak yaitu pemerintah daerah, Gereja maupun keseluruhan masyarakat. Upaya perdamaian yang selalu dilakukan oleh unsur Pemerintah daerah melalui seminar-seminar perdamaian Porto-Haria, pembentukan tim perdamaian Porto dan Haria (Tim 10) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dibuat Seminar penyelesaian konflik Porto Haria ini dihadiri Asops, Aster Kasdam XVI/Pattimura, Kapendam, Kabintaldam XVI/Pattimura, Kolonel (Purn) Tetelepta, Walikota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Ketua DPRD Kota Ambon, Kakesbangpol Promal, Muspida Tk. I Provinsi Maluku, Anggota DPRD Maluku, Tokoh Agama Maluku, Kajari Kota Ambon, Raja Haria-Porto, Dir. Reskrim Polda Maluku, para Rektor Universitas se-Provinsi Maluku, Pimpinan Media Cetak dan Elektronik Kota Ambon, serta para Ketua BEM se-Provinsi Maluku.

Demi kepentingan Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik Porto dan Haria, Pemerintah tampil dalam memainkan peran seperti yang telah dijelaskan demi terwujudnya perdamaian abadi antara Negeri Porto dan Haria. Jika Pemerintah tidak serius dalam upaya pengendalian perdamaian dengan baik, maka konflik dapat meledak sewaktu-waktu dan merupakan tindakan kekerasan yang akan kembali menelan korban jiwa dan harta benda serta merusak hubungan sosial masyarakat kedua Negeri tersebut. Berdasarkan hal itu maka Pemerintah Negeri Porto dan Haria merupakan organisasi harus mampu memberikan solusi demi perdamaian kedua Negeri tersebut, sebab tugas

Pemerintah Negeri bukan hanya sebagai badan Pemerintahan saja tetapi juga sebagai sarana perdamaian yang merupakan bagian dari tugas dan panggilan yang sebenarnya (M. Nanlohy, Raja Negeri Porto).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dan Masyarakat Negeri Porto Dan Haria Dalam Menjaga Perdamaian

Penelitian ingin membahas bagaimana faktor penghambat dan faktor pendorong Proses Perdamaian antara Negeri Porto Dan Negeri Haria. Pemerintah dan Masyarakat Kedua bersepakat untuk melakukan Proses Perdamaian, Guna memberhentikan konflik yang telah terjadi selama beberapa tahun lamanya. terdapat hambatan-hambatan yang terjadi ketika melaksanakan Proses Perdamaian tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara di lapangan yakni yang berlokasi di Negeri Porto dan Negeri Haria, tentang faktor penghambat dan faktor pendorong perdamaian:

Faktor Penghambat Perdamaian

Faktor Penghambat Perdamaian adalah sebagai berikut sulit untuk membangun rasa kepercayaan, terdapat kepentingan lain diluar Pemerintah Negeri Porto dan Negeri Haria sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses perdamaian, dan terdapat didalamnya ada profokasi yang mengintai dan menghancurkan Proses Perdamaian (J. Latupeirissa)

Berbagai pihak pun turut berupaya untuk selalu mengedepankan serta menggaungkan kondisi-kondisi yang aman dan damai. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Slogan-slogan perdamaian yang selama ini selalu digaungkan tidak kunjung terwujud. Perdamaian yang selalu ingin diwujudkan seakan hanya menjadi slogan semata tanpa memahami substansi perdamaian yang ingin dicita-citakan. Lebih jauh kita justru terjebak oleh apa yang disebut oleh Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan, yakni menghilangkan kekerasan dengan kekerasan sehingga melahirkan kekerasan yang baru. Oleh karena itu, sangat menarik jika kita melihat kembali makna perdamaian yang dicetuskan oleh bengawan perdamaian dan resolusi konflik.

Faktor – Faktor Pendorong Perdamaian

Menurut A. Hattu, Perdamaian dipandang bukan hanya sebagai tahapan rekonstruksi perjanjian semata, Namun ia adalah konstruksi sosial yang dinamis. Transformasi dari konflik menuju perdamaian harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik dan menyeluruh dalam upaya mengelola setiap potensi kekerasan baru. Artinya, Proses pembangunan perdamaian harus mewujudkan nilai-nilai negatif menjadi nilai - nilai positif. Pendekatan ini harus dilakukan dengan membangun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik hubungan dalam konteks psikologi, spritual, relasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Berdamai itu enak didengar dan indah dibayangkan, berdamai identik dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula.(J. Tetelepta) oleh karena itu faktor – faktor pendorong perdamaian diantaranya kerja sama antar kedua Negeri, tidak mencari masalah dengan mengaku - ngakuh hak wilayah.

PEMBAHASAN

Konflik merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, selama manusia itu ada maka konflik itu akan selalu ada sehingga sebagai makhluk sosial kita akan selalu diperhadapkan dengan konflik. Salah satu contohnya pada Negeri Porto dan Haria, Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah merupakan negeri tetangga yang berada pada suatu pulau yang sering kali dilanda konflik antar negeri yang memberikan dampak serius pada kerusakan fisik, mental dan sosial, akibatnya semakin buruk kualitas hidup manusia serta terjadinya pemunduran pembangunan manusia. Rasa cinta dan empati yang selama ini selalu digaungkan seakan menjadi lapisan tipis yang tidak mampu lagi menjaga relasi harmonis secara permanen. Jika

kondisi ini terus-menerus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan dapat terjebak pada apa yang disebut sebagai *vulnerable society* (masyarakat rentan) Indonesia. Di mana yang paling kuat adalah pemenangnya, yang kalah harus mati menderita. Atau sebaliknya, yang kalah tidak menerima secara hati terbuka sehingga terus memobilisasi berbagai sumberdaya konflik, seperti kekerasan, massa dan ideologi untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu peran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan suatu konflik, hal ini disebabkan pemerintah merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang dipilih langsung oleh warganya. Dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berurusan dengan masyarakat. Pemerintah dituntut lebih tanggap menyipakati dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, pemerintah mampu bersifat netral dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus memihak sehingga dapat menciptakan perdamaian antar negeri.

J. Latupeirissa selaku ketua saniri Negeri Haria mengatakan bahwa perdamaian itu adalah suatu harapan yang di mana kedua Negeri itu menginginkan ketenangan hati yang didapatkan secara perlahan dalam mengikis konflik-konflik yang telah terjadi dan menimbulkan suatu keharmonisan di kehidupan Negeri Porto dan Negeri Haria. Dari hasil data yang diperoleh jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rieuwpassa 2015) dapat dilihat bahwa penanganan konflik di Negeri Porto dan Haria selama ini sudah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah Negeri. Hanya saja pemerintah harus secepatnya menyelesaikan batas-batas tanah ke dua Negeri yang selama ini diklaim sebagai milik kedua Negeri agar semakin ada kejelasan kepemilikan tanah oleh satu Negeri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Pemerintah dan Masyarakat Negeri Porto Haria dalam menjaga perdamaian” maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :Negeri Porto dan Negeri Haria yang berada di daratan Pulau Saparua ini merupakan kedua Negeri yang sering terjadinya konflik akibat permasalahan hak-hak wilayah, dan kini sejak berakhirnya konflik itu kedua Negeri menyepakati untuk berdamai. Didalam operasi perdamaian Pemerintah kedua Negeri sebagai fasilitator bagi pihak – pihak yg bertikai agar dapat duduk bersama untuk menegosiasikan perjanjian dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian Masyarakat Negeri Porto dan Haria.

Faktor yang mempengaruhi pemerintah dan masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria yaitu faktor penghambat seperti sulit untuk membangun rasa kepercayaan, kepentingan lain diluar Pemerintah, adanya profokasi dan lain-lain. Sedangkan faktor pendukung seperti Kerja sama antar kedua Negeri, Tidak mencari masalah dengan mengaku - ngaku hak wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. 2019. “MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA ' S DIVERSITY” 13 (2): 45–55.
- Gaghaube, Vina G., Roosje Lasut, and Fernando J. M. M. Karisoh. 2021. “PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL” 12 (1): 29–40.
- Harrison, H L, and P. A Loring. 2020. “Seeing Beneath Disputes : A Transdisciplinary Framwork For Diagnosis Complex Convertation Conflicts.” *Biological Coservation* doi : 10.1.
- Idrus. 2007. “Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.” *Yogyakarta : UII Press Yogyakarta*.
- Komariah, Aan, and Djam'an Satori. 2011. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Bandung*.
- Lestari, Tri Diyah, and Nurus Sa'adah. 2021. “Pendidikan Multikultural Solusi Atas Konflik Sosial: Indikasi Intoleran Dalam Keberagaman.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 6 (2): 140. <https://doi.org/10.17977/um021v6i2p140-154>.
- Rieuwpassa, Sarmalina. 2015. “Konflik Porto Haria Di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Suatu Tinjauan Perpspektif Dalam Sosiologi).” *FISIP Universitas*

Pattimura 9 (2).
Tuhuteru, Laros. 1945. "Membina Sikap Masyarakat Dan Nilai-Nilai Demokrasi Pasca Konflik Sosial Ambon."